

**DAMPAK PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP KECERDASAN
EMOSIONAL DAN MORAL WARGA BINAAN
DI RUTAN KELAS IIB BENGKULU**

Fakhri Zain¹, Iqbal Nooramru², Mujtaba Zidniy³, Sofyan Khor Mahendra⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Pengayoman Indonesi, Indonesia

Corresponding Author, Fakhri zain, Email: fakhrizain777@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the impact of religious guidance programs on improving the emotional and moral intelligence of inmates at the Bengkulu Class IIB Detention Center. Religious guidance is seen as a corrective strategy oriented towards behavioral change and the formation of religious character that supports social reintegration. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving informants from guidance officers, religious teachers, and inmates. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of religious activities. The results show that the religious guidance program has a significant effect on increasing self-awareness, empathy, and emotional control among inmates. In addition, the internalization of moral values through interpretation studies, lectures, and congregational worship plays an important role in changing behavioral orientation towards a more constructive direction. Religious guidance at the Bengkulu Detention Center serves not only as a spiritual means, but also as an effective rehabilitative instrument in shaping inmates with religious personalities, morals, and readiness to return to society responsibly

Keywords: religious guidance; emotional intelligence; morality; socialization; social reintegration.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program pembinaan keagamaan terhadap peningkatan kecerdasan emosional dan moral warga binaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Pembinaan keagamaan dipandang sebagai strategi korektif yang berorientasi pada perubahan perilaku dan pembentukan karakter religius yang mendukung reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan narasumber dari petugas pembinaan, ustaz pembimbing, dan warga binaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kegiatan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan keagamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran diri, empati, dan pengendalian emosi warga binaan. Selain itu, internalisasi nilai moral melalui kajian tafsir, ceramah, dan ibadah berjamaah berperan penting dalam mengubah orientasi perilaku ke arah yang lebih konstruktif. Pembinaan keagamaan di Rutan Bengkulu berfungsi tidak hanya sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitatif yang efektif dalam membentuk warga binaan berkepribadian religius, bermoral, dan siap kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab.

Katakunci: pembinaan keagamaan; kecerdasan emosional; moralitas; pemasyarakatan; reintegrasi sosial.

Article Information: Received: Desember 30, 2024

Accepted: Februari 10, 2025

1. Pendahuluan

Pemasyarakatan modern tidak lagi memandang hukuman semata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai proses rehabilitatif yang menekankan pembinaan moral, spiritual, dan sosial. Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengedepankan prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan¹. Dalam konteks tersebut, pembinaan keagamaan memiliki peran strategis sebagai pendekatan transformatif dalam membentuk perilaku dan karakter warga binaan.² Pembinaan keagamaan berfungsi sebagai medium rekonstruksi nilai, di mana warga binaan diarahkan untuk memahami makna hidup, menyesali kesalahan, dan menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki diri. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dimensi religiusitas berkontribusi terhadap pengendalian diri, empati, serta kepekaan sosial individu³⁴. Pembinaan berbasis agama juga terbukti memperkuat kesadaran moral dan tanggung jawab sosial di kalangan narapidana.⁵

Namun demikian, efektivitas pembinaan keagamaan sering kali bergantung pada pendekatan, frekuensi, dan kualitas interaksi antara petugas pembina, ustaz, dan warga binaan. Di Rutan Kelas IIB Bengkulu, kegiatan keagamaan meliputi pengajian rutin, shalat berjamaah, kajian tafsir, dan pembacaan Al-Qur'an. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran spiritual yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku warga binaan. Meskipun

pembinaan keagamaan telah lama diintegrasikan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, efektivitasnya dalam membentuk kecerdasan emosional dan moral warga binaan masih menyisakan pertanyaan konseptual dan empiris. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menekankan aspek seremonial dan ritualistik dari kegiatan keagamaan di lembaga pemasyarakatan, tanpa menguraikan mekanisme psikologis dan sosial yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan diterjemahkan menjadi perubahan perilaku nyata. Padahal, transformasi moral yang diharapkan dari program pembinaan tidak hanya diukur melalui kepatuhan beribadah, tetapi juga dari sejauh mana individu mampu menginternalisasi nilai-nilai etis dan mengatur emosi secara konstruktif dalam interaksi sosial.

Kritik terhadap pendekatan pembinaan yang bersifat top-down juga muncul karena seringkali program keagamaan dijalankan secara formalistik dan tidak memperhitungkan latar belakang psikososial warga binaan. Hal ini berpotensi menciptakan kepatuhan semu yakni kondisi di mana perilaku religius tampak meningkat di permukaan, namun belum sepenuhnya disertai dengan kesadaran emosional dan moral yang mendalam. Dengan kata lain, pembinaan keagamaan berisiko menjadi proses indoktrinatif jika tidak diimbangi dengan pendekatan reflektif yang menumbuhkan kesadaran diri, empati, dan tanggung jawab sosial⁶.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 138

² Adhansyach, N., dan Muhammad A. 2023. "Analisis Pendekatan Agama dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12(2), Hal. 45–59.

³ Goleman, Daniel. 1995. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ*.

New York: Bantam Books. 2001. *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.

⁴ Nata, Abuddin. 2010. *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Press.

⁵ Maruna, Shadd. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington, DC: American Psychological Association.

⁶ Rahardjo, M. 2020. "Mengkaji Ulang Efektivitas Pembinaan Keagamaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia* 9(1), Hal. 22–37.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengaitkan pembinaan keagamaan dengan teori kecerdasan emosional modern seperti yang dikemukakan Goleman dimana mencakup dimensi *self-awareness*, *self-regulation*, *motivation*, *empathy*, dan *social skills*. Integrasi antara teori psikologi modern dan pendekatan religius dalam konteks masyarakat masih sangat terbatas⁷. Padahal, sinergi keduanya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pembentukan perilaku positif di kalangan narapidana. Dari perspektif kebijakan, pembinaan keagamaan juga menghadapi tantangan struktural. Keterbatasan tenaga pembina profesional, ruang ibadah yang tidak proporsional, serta kurikulum pembinaan yang belum distandardisasi menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.⁸ Di Rutan Kelas IIB Bengkulu, misalnya, kegiatan pembinaan masih bergantung pada inisiatif individu petugas dan dukungan sukarela tokoh agama setempat. Situasi ini menimbulkan disparitas antara idealitas normatif yang diamanatkan dalam kebijakan masyarakat dan realitas implementatif di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian pada dua dimensi utama. Pertama, dari sisi psikologis, penelitian ini menganalisis bagaimana pembinaan keagamaan dapat berfungsi sebagai emotional restructuring process yakni proses rekonstruksi emosional yang menata kembali cara warga binaan memahami, merasakan, dan mengekspresikan emosi mereka secara sehat dan sosial adaptif. Kedua, dari sisi moral, penelitian ini menginvestigasi bagaimana pengalaman religius selama masa pembinaan memfasilitasi

pembentukan kesadaran etis dan tanggung jawab moral yang menjadi prasyarat reintegrasi sosial yang berhasil. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menghubungkan studi masyarakat, psikologi emosional, dan pendidikan moral berbasis agama dalam satu kerangka konseptual terpadu. Penelitian ini juga menempatkan warga binaan bukan sebagai objek binaan pasif, melainkan sebagai subjek reflektif yang berpotensi mengembangkan *self-religious awareness* kesadaran religius yang lahir dari pengalaman eksistensial dan introspeksi mendalam selama menjalani hukuman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai pembinaan keagamaan sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai proses transformatif menuju pemulihan identitas moral dan spiritual warga binaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif yang diarahkan untuk memahami secara mendalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan kecerdasan emosional dan moral warga binaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna subjektif, sehingga tidak dapat direduksi menjadi data numerik semata. Dalam kerangka epistemologis konstruktivisme, realitas sosial yang dihadapi warga binaan dipahami sebagai hasil konstruksi interaktif antara individu, pembina, dan lingkungan sosial rutan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyingkap dinamika batiniah dan perubahan perilaku warga binaan sebagai bentuk rekonstruksi emosional dan spiritual melalui pengalaman religius yang dialami selama

⁷ Goffman, Erving. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

⁸ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2023. *Pedoman Pelaksanaan Program*

Pembinaan Keagamaan di Lembaga Masyarakat dan Rutan. Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakat.

masa pembinaan. Rutan Kelas IIB Bengkulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki pola pembinaan keagamaan yang relatif terstruktur dan beragam, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik dan efektivitas program tersebut dalam konteks nyata masyarakat.

Subjek penelitian terdiri dari sepuluh warga binaan yang aktif mengikuti program pembinaan keagamaan minimal selama tiga bulan, dua pembimbing rohani (ustaz), dan tiga petugas rutan bagian pembinaan. Penentuan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan aktif, kemampuan reflektif, dan kesediaan berpartisipasi secara etis. Pemilihan informan semacam ini bukan sekadar pertimbangan teknis, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa data yang diperoleh mewakili kedalaman pengalaman religius dan proses emosional yang terjadi. Kehadiran peneliti di lapangan tidak bersifat pasif, melainkan partisipatif-reflektif, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan warga binaan dan pembina untuk menangkap makna-makna yang muncul dalam situasi alami pembinaan. Posisi peneliti sebagai *instrument of inquiry* menjadikan keterlibatan personal sekaligus sebagai alat interpretatif untuk memahami konteks moral dan spiritual yang sedang dibangun di balik tembok masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan pembinaan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali narasi pengalaman emosional dan spiritual warga binaan, sedangkan observasi dilakukan untuk menangkap ekspresi non-verbal, partisipasi sosial, dan perubahan sikap selama kegiatan keagamaan berlangsung. Dokumentasi berupa jadwal kegiatan, catatan pembinaan, dan arsip rutan

digunakan untuk melengkapi informasi empiris serta memverifikasi konsistensi data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke, yang meliputi proses koding, identifikasi pola, dan interpretasi makna dalam kerangka tematik yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data melalui refleksi berulang agar setiap tema yang muncul benar-benar merepresentasikan pengalaman subjektif warga binaan tentang perubahan emosional dan moralnya.⁹

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, member checking kepada informan, serta diskusi sejawat (*peer debriefing*) guna memastikan kredibilitas interpretasi. Validitas dalam konteks penelitian kualitatif tidak diukur dengan replikasi data, melainkan melalui kedalaman dan konsistensi makna yang dihasilkan. Peneliti juga menerapkan prinsip reflektivitas dengan menyadari posisi, nilai, dan potensi bias pribadi selama proses penelitian berlangsung. Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika ilmiah, di mana setiap informan diberikan penjelasan dan persetujuan sukarela (*informed consent*), serta dijamin anonimitas dan kerahasiaannya. Dengan pendekatan yang reflektif dan partisipatif ini, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai upaya epistemologis untuk memahami pembinaan keagamaan sebagai mekanisme rehabilitatif yang menata ulang aspek spiritual, emosional, dan moral warga binaan menuju reintegrasi sosial yang berkeadaban.

⁹ Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3(2), Hal. 77–101.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembinaan Keagamaan sebagai Sarana Rehabilitasi Spiritual

Kegiatan pembinaan di Rutan Bengkulu mencakup pengajian, ceramah agama, dan pembinaan rohani mingguan. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan ini meningkatkan partisipasi warga binaan dalam kegiatan positif, mengurangi konflik antar napi, serta memperkuat kesadaran spiritual. Pembinaan agama menjadi ruang refleksi dan introspeksi moral yang menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kesalahan masa lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ritual keagamaan, tetapi juga sebagai proses rekonstruksi identitas spiritual warga binaan. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, dzikir bersama, dan diskusi tafsir Al-Qur'an berperan sebagai ruang *spiritual recovery* di mana warga binaan berhadapan dengan pengalaman moral dan psikologisnya secara reflektif. Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan berfungsi sebagai arena transformasi diri, tempat narapidana menegosiasikan kembali makna kesalahan, penyesalan, dan tanggung jawab moral atas tindakannya di masa lalu. Namun demikian, proses ini tidak berlangsung linier. Transformasi spiritual kerap diwarnai ambivalensi emosional antara rasa bersalah, harapan, dan pencarian makna baru dalam kehidupan yang sangat terbatas oleh sistem dan ruang fisik rutan.

Pendalaman data melalui wawancara memperlihatkan bahwa mayoritas warga binaan memaknai kegiatan keagamaan bukan sekadar sebagai kewajiban religius, tetapi sebagai bentuk penemuan kembali jati diri yang sempat tercerabut oleh perilaku menyimpang di masa lalu. Salah satu warga binaan menyatakan bahwa pembinaan keagamaan membuatnya “merasa kembali

diingat bahwa dirinya masih memiliki nilai di mata Tuhan, bukan sekadar pelaku kejahatan di mata manusia.” Narasi seperti ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berhasil membuka dimensi eksistensial warga binaan, yang dalam terminologi psikologi agama disebut sebagai self-transcendence kemampuan melampaui identitas diri lama dan menemukan makna baru dalam penderitaan¹⁰. Artinya, dimensi rehabilitatif dari pembinaan keagamaan tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga eksistensial, mengarah pada penyembuhan batin dan pemulihan rasa kemanusiaan yang selama ini tereduksi oleh stigma sosial dan sistem penghukuman.

Namun, hasil lapangan juga menyingkap adanya problem konseptual dalam praktik pembinaan keagamaan. Di satu sisi, kegiatan keagamaan memang memberikan efek menenangkan dan memperkuat kesadaran religius; tetapi di sisi lain, sebagian warga binaan mengaku mengikuti kegiatan tersebut lebih karena tekanan sosial dan harapan untuk mendapatkan penilaian baik dari petugas, bukan karena motivasi spiritual intrinsik. Fenomena ini mengindikasikan adanya dimensi instrumentalisasi religiusitas, di mana agama dijadikan alat adaptasi strategis dalam sistem rutan. Hal ini selaras dengan temuan Maruna tentang compliance-based rehabilitation, yakni bentuk rehabilitasi yang berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada perubahan internal yang autentik¹¹. Kondisi ini menuntut evaluasi kritis terhadap cara pembinaan keagamaan dijalankan: sejauh mana program ini benar-benar memfasilitasi proses refleksi dan pembentukan kesadaran moral, bukan hanya menjadi sarana simbolik untuk memenuhi standar pembinaan yang ditetapkan institusi.

Secara kelembagaan, hasil observasi menunjukkan bahwa peran pembina agama

¹⁰ Frankl, Viktor E. 1984. *Man's Search for Meaning*. Boston: Beacon Press.

¹¹ Maruna, Shadd. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*.

Washington, DC: American Psychological Association.

atau ustaz sering kali menjadi faktor determinan keberhasilan program. Warga binaan cenderung lebih terbuka ketika pembina memperlakukan mereka secara humanis dan tidak menghakimi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi relasional dalam pembinaan memiliki peran signifikan dalam membangun kepercayaan dan membuka ruang introspeksi emosional. Pembina yang empatik dan inklusif mampu menciptakan iklim spiritual yang menumbuhkan rasa aman psikologis prasyarat penting bagi terjadinya proses transformasi moral yang sejati. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan keagamaan tidak semata bergantung pada intensitas kegiatan, melainkan pada kualitas interaksi dan kedalaman komunikasi spiritual yang terjalin antara pembina dan warga binaan.

Dari sudut pandang teoretik, pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu menunjukkan gejala pergeseran paradigma dari model pembinaan yang bersifat dogmatis menuju pendekatan reflektif-humanistik. Pergeseran ini mengisyaratkan bahwa spiritualitas dalam konteks pelayaran bukan lagi diposisikan sebagai perintah normatif agama, tetapi sebagai sarana self-rehabilitation yang memungkinkan individu memahami dirinya, menata emosinya, dan membangun kembali moralitasnya. Dengan demikian, pembinaan keagamaan dapat dibaca sebagai bentuk praksis dari integrasi antara teori kecerdasan emosional Goleman dan teori moral development Kohlberg, di mana warga binaan bergerak dari kepatuhan eksternal menuju kesadaran moral internal¹² Proses ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi spiritual yang efektif bukan sekadar “mengajarkan agama”, tetapi menumbuhkan kesadaran untuk menjadi manusia kembali yang mampu mengelola emosi, memahami kesalahan, dan bertanggung jawab atas masa depannya secara moral dan sosial.

3.2 Analisis Yuridis dan Hambatan Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kecerdasan emosional warga binaan, khususnya pada dimensi kesadaran diri (*self-awareness*), pengendalian diri (*self-regulation*), dan empati (*empathy*). Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara terstruktur seperti shalat berjamaah, pengajian reflektif, dzikir bersama, serta ceramah tematik tentang makna kesabaran dan taubat berperan sebagai medium internalisasi nilai yang melatih kemampuan warga binaan untuk mengenali dan mengelola emosi negatif mereka. Di tengah situasi yang penuh tekanan psikologis akibat keterbatasan ruang, kehilangan kebebasan, dan beban rasa bersalah, kegiatan keagamaan menghadirkan ruang simbolik untuk menyalurkan emosi dengan cara yang konstruktif. Warga binaan tidak lagi mengekspresikan frustrasi melalui agresivitas, tetapi mengarahkan energi emosional mereka ke dalam refleksi spiritual, doa, dan perenungan diri.

Wawancara dengan beberapa warga binaan memperkuat temuan ini. Sebagian besar menyatakan bahwa setelah aktif mengikuti kegiatan keagamaan, mereka menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu menahan amarah ketika menghadapi konflik internal di antara sesama penghuni rutan. Salah satu informan bahkan menyebut bahwa “sebelum ikut kajian, saya mudah marah dan sering berdebat; sekarang saya lebih memilih diam dan berdoa.” Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran pola pengelolaan emosi dari reaksi impulsif menuju respons reflektif. Dalam perspektif Goleman, perubahan semacam ini menandakan adanya perkembangan

¹² Goleman, Daniel. 1995. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ*. New

York: Bantam Books. 2001. *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.

pada dua komponen utama kecerdasan emosional: self-regulation dan self-motivation. Artinya, pembinaan keagamaan berfungsi sebagai katalis yang menata ulang sistem afektif individu dari orientasi terhadap pelampiasan emosi menuju orientasi pada pengendalian diri yang berlandaskan nilai spiritual. Transformasi ini bukan hanya bersifat psikologis, tetapi juga moral, karena pengendalian diri yang dilandasi kesadaran religius menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap konsekuensi etis dari setiap tindakan.

Namun, hasil penelitian juga mengungkap paradoks yang menarik. Meskipun sebagian besar warga binaan menunjukkan peningkatan pengendalian diri, masih ditemukan beberapa individu yang memanfaatkan kegiatan keagamaan sekadar untuk memperoleh pengakuan sosial atau citra baik di mata petugas. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara religiusitas eksternal dan kesadaran emosional internal. Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan berisiko menghasilkan *emotional conformity* yaitu bentuk penyesuaian emosional yang muncul karena tekanan sosial, bukan karena kesadaran autentik. Temuan ini sejalan dengan kritik Nursalim yang menilai bahwa kecerdasan emosional tidak dapat berkembang optimal tanpa refleksi diri yang mendalam dan dukungan lingkungan yang empatik.¹³ Oleh karena itu, pembinaan keagamaan perlu dirancang tidak hanya sebagai transfer nilai-nilai moral, tetapi juga sebagai proses pembelajaran emosional yang mendorong partisipasi reflektif dan dialog batin antara warga binaan dan pembina spiritual.

Perubahan emosional yang diamati selama penelitian juga menunjukkan bahwa aspek komunitas religius

(*religious community bonding*) memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas psikologis warga binaan. Dalam kegiatan keagamaan kolektif, mereka menemukan kembali rasa memiliki (*sense of belonging*) yang sempat hilang akibat stigma sosial dan keterputusan relasi dengan dunia luar. Proses ini memperkuat apa yang disebut Goffman sebagai *identity reconstruction*, yakni upaya membangun kembali citra diri yang positif melalui interaksi sosial yang penuh penerimaan. Ketika warga binaan merasa diterima oleh sesama dalam iklim spiritual yang damai, mereka belajar mengenali emosi orang lain dan mengembangkan empati yang lebih dalam. Dengan kata lain, pengalaman spiritual bersama tidak hanya berfungsi sebagai terapi batin individual, tetapi juga sebagai laboratorium sosial tempat mereka mempraktikkan kecerdasan emosional dalam konteks relasi interpersonal yang nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu berperan ganda: sebagai emotional rehabilitation yang memulihkan keseimbangan afektif individu dan sebagai moral reorientation yang mengarahkan emosi ke dalam perilaku etis. Kecerdasan emosional yang terbentuk melalui praktik religius tidak berhenti pada kemampuan mengelola perasaan pribadi, tetapi berkembang menjadi kesadaran sosial yang mendorong warga binaan untuk berinteraksi dengan lebih hormat, empatik, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas, dalam konteks pelayaran, bukan sekadar sistem keyakinan, melainkan juga struktur afektif yang berfungsi sebagai mekanisme penyembuhan psikologis dan rekonstruksi moral menuju individu yang lebih matang secara emosional dan

¹³ Nursalim, M. 2019. *Kecerdasan Emosional dan Pembinaan Moral dalam Perspektif Konseling Islami*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

beradab secara sosial.

3.3 Diskursus Kritis dan Implikasi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanaman dogma atau pengetahuan agama, melainkan sebagai proses internalisasi nilai moral yang membentuk kesadaran etis warga binaan. Proses internalisasi ini berjalan melalui dua jalur simultan pertama, refleksi kognitif terhadap ajaran agama yang diperoleh dalam pengajian, ceramah, dan bimbingan rohani; kedua, pengalaman afektif melalui praktik ibadah yang berulang dan interaksi sosial religius dalam lingkungan rutan. Dari observasi dan wawancara mendalam, tampak bahwa warga binaan mulai mengaitkan ajaran keagamaan dengan konteks personal mereka bukan sekadar memahami konsep dosa dan pahala, tetapi menempatkan ajaran itu dalam bingkai tanggung jawab moral terhadap diri, sesama, dan Tuhan. Perubahan orientasi nilai ini menandakan pergeseran dari moralitas eksternal menuju moralitas reflektif, di mana tindakan baik tidak lagi didorong oleh ketakutan terhadap hukuman, melainkan oleh kesadaran batin untuk memperbaiki diri.

Perkembangan tersebut dapat dibaca melalui kacamata teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, yang menyatakan bahwa individu akan bergerak dari tahap kepatuhan konvensional menuju tahap pasca-konvensional ketika ia mulai menilai benar-salah berdasarkan prinsip universal dan kesadaran pribadi. Dalam konteks pembinaan keagamaan, warga binaan menunjukkan tanda-tanda pergeseran ini. Mereka tidak hanya menaati peraturan rutan karena kewajiban, tetapi mulai menafsirkan ketaatan sebagai bentuk

tanggung jawab moral dan spiritual. Beberapa warga binaan, misalnya, mengaku bahwa setelah mengikuti pembinaan, mereka merasa terdorong untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, meminta maaf kepada korban, dan menolak ajakan perilaku negatif di dalam rutan. Narasi-narasi ini memperlihatkan bahwa pembinaan keagamaan tidak berhenti pada aspek ritualistik, tetapi melahirkan refleksi etis yang menumbuhkan komitmen terhadap nilai kebaikan dan keadilan. Dengan demikian, agama menjadi sumber moralitas yang hidup bukan sekadar norma formal, tetapi pengalaman eksistensial yang menata ulang orientasi perilaku.

Meski demikian, proses penguatan moral ini juga menghadapi tantangan konseptual dan praktis. Sebagian warga binaan masih menafsirkan moralitas secara transaksional, mengaitkan amal baik dengan imbalan spiritual atau pengurangan hukuman administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran moral belum sepenuhnya otonom, melainkan masih dikendalikan oleh motivasi pragmatis. Hal ini sesuai dengan kritik Rest yang menyebut bahwa perkembangan moral tidak dapat dipaksakan melalui indoktrinasi, melainkan harus lahir dari pengalaman reflektif yang autentik.¹⁴ Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan keagamaan sangat bergantung pada sejauh mana program mampu mendorong dialog moral ruang di mana warga binaan dapat mendiskusikan dilema etis nyata yang mereka alami, bukan hanya mendengarkan ceramah satu arah. Tanpa proses refleksi tersebut, pembinaan berpotensi menghasilkan kepatuhan moral semu yang mudah runtuh setelah individu keluar dari sistem rutan. Temuan ini menjadi catatan kritis bagi lembaga pemasyarakatan bahwa moralitas tidak

¹⁴ Rest, James R. 1994. *Moral Development in the Professions: Psychology and Applied Ethics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

dapat diproduksi melalui rutinitas ibadah, melainkan dibangun melalui proses penghayatan nilai secara sadar dan personal.

Meskipun menghadapi keterbatasan tersebut, tidak dapat diabaikan bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu telah membuka ruang bagi rekonstruksi moral yang lebih manusiawi. Warga binaan yang sebelumnya teralienasi dari nilai kebaikan mulai membangun kembali konsep diri sebagai individu bermoral dan bernilai sosial. Kesadaran moral yang terbentuk dari pengalaman religius ini memiliki implikasi langsung terhadap proses reintegrasi sosial individu yang memiliki orientasi moral kuat lebih mungkin untuk menolak perilaku menyimpang setelah bebas dan berpartisipasi secara positif di masyarakat. Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan menjadi bentuk *moral rehabilitation* yang efektif bukan hanya memulihkan hubungan spiritual manusia dengan Tuhan, tetapi juga memulihkan relasi etik antara individu dan komunitas. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dimensi moral dalam pembinaan keagamaan berfungsi sebagai fondasi bagi reintegrasi sosial yang berkelanjutan, menegaskan bahwa perubahan sejati dalam sistem pemyarakatan tidak mungkin tercapai tanpa transformasi kesadaran moral di tingkat individu.

3.4. Relevansi terhadap Reintegrasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan memiliki keterkaitan langsung dengan kesiapan warga binaan untuk menjalani reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir. Proses pembinaan spiritual tidak hanya menumbuhkan kesadaran religius, tetapi juga menanamkan disposisi moral dan emosional yang menjadi modal sosial penting bagi kehidupan pasca-rutan. Warga binaan yang aktif mengikuti

kegiatan keagamaan menunjukkan peningkatan kemampuan beradaptasi, kedisiplinan, serta sikap kooperatif dalam interaksi sosial di dalam rutan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tolong-menolong, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap sesama menjadi bagian dari habitus baru yang mereka internalisasi melalui praktik keagamaan. Dengan demikian, pembinaan keagamaan berfungsi sebagai *transitional mechanism* yang menghubungkan rehabilitasi individu dengan kesiapan sosial membangun jembatan psikologis dan moral antara dunia pemyarakatan yang terisolasi dengan realitas masyarakat yang menuntut kemandirian dan kepercayaan sosial.

Transformasi spiritual ini terbukti memengaruhi cara warga binaan memandang masyarakat dan masa depan mereka. Dari wawancara mendalam terungkap bahwa sebagian besar warga binaan mengalami perubahan cara berpikir dari rasa takut dan rendah diri menjadi semangat untuk menebus kesalahan dan berkontribusi positif. Salah satu informan menyatakan bahwa “pembinaan keagamaan membuat saya berani bermimpi lagi untuk hidup lebih baik di luar nanti.” Narasi semacam ini menunjukkan adanya proses *cognitive restructuring* perubahan kerangka berpikir yang menandai kesiapan individu untuk menghadapi tantangan sosial dengan optimisme moral. Fenomena ini sejalan dengan teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh Braithwaite, yang menekankan bahwa rasa bersalah yang dipulihkan melalui dukungan moral dan spiritual dapat menjadi titik balik menuju perilaku

prososial.¹⁵ Pembinaan keagamaan, dalam konteks ini, menjadi wadah yang mengubah rasa bersalah destruktif menjadi rasa tanggung jawab konstruktif; dari rasa malu yang menindas menjadi rasa malu yang memotivasi perbaikan diri.

Namun, keberhasilan pembinaan keagamaan dalam mempersiapkan reintegrasi sosial juga menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Stigma sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi tembok psikologis yang tinggi, menghambat penerimaan mereka di lingkungan masyarakat. Beberapa warga binaan mengungkapkan kekhawatiran bahwa masyarakat akan menilai mereka hanya berdasarkan masa lalu, bukan perubahan yang telah mereka jalani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa reintegrasi sosial bukan semata persoalan kesiapan individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menyediakan ruang penerimaan. Tanpa adanya dukungan sosial, nilai-nilai moral dan emosional yang ditanamkan melalui pembinaan keagamaan berisiko melemah atau bahkan hilang ketika individu kembali ke lingkungan yang penuh stigma. Di sinilah muncul kebutuhan akan *continuity of care* keberlanjutan pembinaan dan pendampingan spiritual di luar rutan melalui kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, tokoh agama, dan masyarakat sipil, agar proses transisi menuju kehidupan bebas dapat berlangsung secara utuh dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu dapat dibaca sebagai model integratif dari *spiritual rehabilitation* dan *social reintegration*. Proses pembinaan ini tidak berhenti pada penguatan spiritual individu, tetapi juga membangun

kapasitas sosial yang memungkinkan warga binaan berperan kembali secara produktif dalam masyarakat. Dengan meningkatnya kecerdasan emosional, moralitas reflektif, dan kemampuan berempati, warga binaan menunjukkan kesiapan untuk menjadi bagian dari komunitas yang konstruktif. Hal ini memperkuat pandangan Sampson dan Laub bahwa reintegrasi sosial yang berhasil tidak hanya bergantung pada sistem hukum atau kebijakan formal, tetapi juga pada kekuatan ikatan sosial dan moral yang dibangun selama masa pembinaan¹⁶. Dengan demikian, pembinaan keagamaan tidak sekadar berperan sebagai program religius internal rutan, melainkan sebagai strategi reintegratif yang menata kembali hubungan antara individu, nilai, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan sangat ditentukan oleh keberlanjutan nilai-nilai moral dan emosional yang dibentuk selama pembinaan keagamaan. Pembinaan yang menekankan dimensi reflektif dan empatik terbukti lebih efektif dalam mempersiapkan individu menghadapi realitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan, tetapi juga pada penguatan kapasitas spiritual-sosial yang mendorong penerimaan dan partisipasi warga binaan dalam kehidupan bermasyarakat. Reintegrasi sosial yang berkeadaban hanya dapat tercapai jika rehabilitasi spiritual di dalam rutan diimbangi dengan rekonsiliasi sosial di luar rutan. Dengan kata lain, pembinaan keagamaan harus dipandang bukan sebagai penutup dari proses pemasyarakatan, melainkan

¹⁵ Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁶ Laub, John H., dan Robert J. Sampson. 2003. *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

sebagai fondasi moral bagi kebebasan yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan bukan sekadar praktik religius yang bersifat ritualistik, melainkan sebuah proses rehabilitatif yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks Rutan Kelas IIB Bengkulu, pembinaan keagamaan terbukti memainkan peran ganda: sebagai *spiritual therapy* yang menyembuhkan luka batin warga binaan, dan sebagai moral *pedagogy* yang menanamkan nilai-nilai etik dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat tesis bahwa rehabilitasi narapidana tidak dapat semata-mata diserahkan kepada mekanisme hukum atau sanksi formal, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan dimensi keagamaan, emosional, dan moral. Temuan ini sejalan dengan pandangan Maruna dan Goffman, yang menegaskan bahwa proses pemulihan identitas moral individu pascahukuman hanya mungkin terjadi ketika sistem pemasyarakatan menyediakan ruang refleksi dan pengakuan atas nilai kemanusiaannya. Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan berfungsi sebagai medium yang memulihkan martabat spiritual warga binaan yang selama ini direduksi oleh stigma sosial dan pengalaman penghukuman.

Dari perspektif psikologis, peningkatan kecerdasan emosional yang muncul dari kegiatan keagamaan menunjukkan bahwa spiritualitas dapat berfungsi sebagai instrumen regulasi emosi dan terapi afektif yang efektif. Aktivitas religius seperti doa, dzikir, dan kajian tafsir menciptakan kondisi introspektif yang memungkinkan individu mengenali, menafsirkan, dan mengelola emosi negatif secara lebih konstruktif. Ini mengafirmasi teori Goleman yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, empati, dan kemampuan social semua komponen yang ditemukan berkembang melalui interaksi religius yang bermakna. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan paradoks yang

subtil peningkatan emosional tidak selalu berarti kesadaran spiritual yang mendalam. Beberapa warga binaan menunjukkan gejala *emotional conformity* atau kepatuhan emosional yang muncul karena tekanan sosial dan ekspektasi institusional, bukan kesadaran autentik. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas pembinaan keagamaan tidak dapat diukur dari kepatuhan eksternal semata, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut menumbuhkan refleksi batin dan kesadaran diri yang otonom. Oleh karena itu, keberhasilan program pembinaan menuntut transformasi paradigma dari model dogmatis ke model reflektif-partisipatif, yang menempatkan warga binaan sebagai subjek spiritual, bukan objek pembinaan.

Dari sisi moral, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pembinaan keagamaan dapat berfungsi sebagai katalis bagi perkembangan moral reflektif warga binaan. Internalisasi nilai moral yang ditanamkan melalui ajaran agama seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran atas akibat tindakan menjadi fondasi bagi rekonstruksi etis individu. Proses ini memperlihatkan dinamika perkembangan moral yang sesuai dengan kerangka teori Kohlberg, di mana individu bergerak dari moralitas konvensional menuju moralitas pasca-konvensional, yakni tahap ketika nilai moral dipahami bukan lagi sebagai perintah eksternal, tetapi sebagai komitmen pribadi terhadap kebaikan universal. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Rest, perkembangan moral sejati tidak dapat dicapai melalui indoktrinasi atau repetisi ritual, melainkan melalui pengalaman reflektif yang melibatkan kesadaran dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan yang terlalu menekankan kepatuhan ritual tanpa memberikan ruang dialog moral berisiko melahirkan moralitas instrumental yakni perilaku baik yang didorong oleh harapan penghargaan, bukan kesadaran etis. Temuan ini menjadi kritik penting terhadap kebijakan pembinaan yang masih bersifat seremonial dan hierarkis, dan

mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih dialogis dan transformatif dalam pendidikan moral di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif sosial, pembinaan keagamaan memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses reintegrasi warga binaan. Peningkatan kecerdasan emosional dan moralitas reflektif menciptakan kesiapan psikologis untuk kembali ke masyarakat dengan sikap adaptif dan konstruktif. Namun, reintegrasi sosial tidak dapat dipahami sebagai proses unilateral yang hanya menuntut perubahan individu merupakan relasi timbal balik antara warga binaan dan masyarakat. Masyarakat yang masih menstigma mantan narapidana berpotensi meniadakan hasil positif pembinaan keagamaan, karena tidak memberikan ruang penerimaan dan pengakuan sosial. Temuan ini menegaskan relevansi teori *reintegrative shaming Braithwaite*, yang menyatakan bahwa rasa malu hanya dapat menjadi kekuatan rehabilitatif bila disertai dengan penerimaan kembali oleh komunitas. Dalam konteks ini, pembinaan keagamaan berfungsi sebagai titik awal rekonsiliasi moral membentuk individu yang siap kembali ke masyarakat, tetapi keberlanjutannya memerlukan struktur sosial yang inklusif dan ekosistem dukungan yang berkelanjutan.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan keagamaan merupakan bentuk *integrated correctional approach* yang menggabungkan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam satu kerangka rehabilitasi. Kegiatan keagamaan yang dijalankan dengan pendekatan reflektif dapat menjadi wadah moral regeneration sebuah proses di mana individu tidak hanya menyesuaikan perilaku, tetapi juga menata ulang kesadaran dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Di sisi lain, temuan ini mengandung implikasi praktis bagi kebijakan masyarakat di Indonesia: bahwa efektivitas pembinaan keagamaan tidak diukur dari banyaknya kegiatan

religius yang dilaksanakan, melainkan dari kualitas relasi spiritual, kedalaman refleksi, dan kontinuitas dukungan setelah pembebasan. Pembinaan keagamaan yang sejati bukan hanya mengajarkan “cara beribadah,” tetapi membangun kemampuan “berperilaku bermoral” dan “berpikir etis.” Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran agama dalam sistem masyarakat bukan sekadar simbol moralitas, melainkan kekuatan transformasional yang mampu mengembalikan kemanusiaan narapidana dan membangun fondasi bagi kehidupan bebas yang bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kecerdasan emosional, penguatan moral, dan kesiapan reintegrasi sosial warga binaan. Program pembinaan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan spiritual yang bersifat ritualistik, tetapi juga sebagai proses rehabilitatif yang menyentuh dimensi terdalam kemanusiaan. Melalui praktik reflektif keagamaan, warga binaan belajar mengenali emosi mereka, mengelola rasa bersalah, serta membangun kembali citra diri yang positif. Pembinaan ini terbukti menumbuhkan empati, kesabaran, dan rasa tanggung jawab moral, yang menjadi fondasi utama bagi kehidupan sosial yang etis dan produktif setelah masa pidana berakhir. Dengan demikian, pembinaan keagamaan bukan sekadar instrumen korektif, melainkan mekanisme transformasi spiritual yang menata ulang kesadaran moral dan afektif warga binaan menuju kematangan psikologis dan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara religiusitas, kecerdasan emosional, dan perkembangan moral dalam konteks masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa spiritualitas dapat berfungsi sebagai *emotional and moral regulator* yang efektif,

memediasi proses perubahan perilaku dari kepatuhan eksternal menuju kesadaran internal. Dengan mengintegrasikan perspektif Goleman (1995) tentang kecerdasan emosional dan Kohlberg (1981) tentang perkembangan moral, penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan keagamaan yang dijalankan dengan pendekatan reflektif-partisipatif mampu menghasilkan perubahan kognitif, afektif, dan etis yang berkelanjutan. Lebih jauh, hasil ini memperkaya diskursus akademik tentang *rehabilitative correctional models*, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diadaptasi secara rasional dan humanistik sebagai landasan bagi sistem pemasyarakatan modern yang berkeadaban.

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi reformasi sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Pertama, pembinaan keagamaan perlu didesain ulang dari pendekatan dogmatis dan seremonial menuju pendekatan reflektif dan dialogis yang menumbuhkan kesadaran diri warga binaan. Pembina atau ustaz perlu dibekali dengan kompetensi psikospiritual dan pedagogis agar mampu berperan bukan hanya sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai fasilitator refleksi moral dan pengelolaan emosi. Kedua, lembaga pemasyarakatan perlu membangun jejaring kolaboratif dengan masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial untuk menjamin keberlanjutan pembinaan setelah warga binaan bebas. Pembinaan yang berhenti di dalam rutan berisiko kehilangan efek rehabilitatifnya jika tidak didukung oleh sistem penerimaan sosial yang inklusif. Ketiga, kebijakan pembinaan harus mengintegrasikan aspek evaluasi berbasis dampak, bukan sekadar partisipasi, agar keberhasilan program dapat diukur dari perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi warga binaan secara nyata.

Dapat disimpulkan penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan keagamaan yang dijalankan dengan pendekatan humanistik dan reflektif merupakan salah satu kunci utama keberhasilan

pemasyarakatan di era modern. Di tengah krisis moral dan sosial yang melanda masyarakat, sistem pemasyarakatan yang berorientasi spiritual bukan hanya mengoreksi perilaku menyimpang, tetapi juga memulihkan martabat kemanusiaan individu yang terhukum. Dengan menempatkan agama sebagai sumber nilai, moralitas sebagai orientasi, dan refleksi emosional sebagai metode, pembinaan keagamaan dapat berfungsi sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi pemasyarakatan ke depan perlu mengadopsi paradigma baru yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan paradigma yang memandang setiap warga binaan sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah, tumbuh, dan kembali berkontribusi bagi kehidupan sosial yang lebih beradab.

References

- Adhansyach, N., dan Muhammad A. 2023. "Analisis Pendekatan Agama dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12(2): 45–59.
- Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3(2): 77–101.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, eds. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Efendi, U. 2019. *Proses Labeling Mantan Narapidana di Masyarakat Kelurahan*

- Limo, Depok. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitriana, Dina. 2022. "Analisis Pemenuhan Hak Gizi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 8(2): 101–115.
- Frankl, Viktor E. 1984. *Man's Search for Meaning*. Boston: Beacon Press.
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Goleman, Daniel. 1995. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ*. New York: Bantam Books.
2001. *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Haryanto, Budi, dan Ahmad Siregar. 2020. "Implementasi Hak Asasi Narapidana dalam Pemenuhan Gizi Seimbang di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal HAM* 11(1): 45–59.
- Hendarto, A. R., A. D. Firmansyah, dan A. Nuhgroho. 2022. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III: Back to Basic*. Jakarta: IDE Publishing.
- Ibipurwo, G. T., Y. A. Wibowo, dan J. Setiawan. 2022. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21(2): 155–178.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2023. *Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Kohlberg, Lawrence. 1981. *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.
- Laub, John H., dan Robert J. Sampson. 2003. *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- LeBel, Thomas P. 2012. "If One Doesn't Get You Another One Will: Formerly Incarcerated Persons' Perceptions of Discrimination." *The Prison Journal* 92(1): 63–87.
- Maruna, Shadd. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Nata, Abuddin. 2010. *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugroho, Andri. 2019. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dasar Narapidana atas Konsumsi Layak di Lapas Kelas IIA Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(3): 329–343.
- Nursalim, M. 2019. *Kecerdasan Emosional dan Pembinaan Moral dalam Perspektif Konseling Islami*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Pager, Devah. 2003. "The Mark of a Criminal Record." *American Journal of Sociology* 108(5): 937–975.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Narapidana dan Tahanan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1645*.
- Rahardjo, M. 2020. "Mengkaji Ulang Efektivitas Pembinaan Keagamaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia* 9(1): 22–37.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rest, James R. 1994. *Moral Development in the Professions: Psychology and Applied Ethics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sampson, Robert J., dan John H. Laub. 2003. "Desistance from Crime over the Life Course." In *Handbook of the Life*

- Course, edited by Jeylan T. Mortimer dan Michael J. Shanahan, 295–309. New York: Springer.
- Smith, Jason, dan Judith Resodihardjo. 2020. “Nutrition and Human Rights in Correctional Facilities: A Comparative Analysis of Prison Food Policies.” *International Journal of Prison Reform Studies* 14(2): 67–83.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Travis, Jeremy. 2005. *But They All Come Back: Facing the Challenges of Prisoner Reentry*. Washington, DC: Urban Institute Press.
- Uggen, Christopher. 2000. “Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism.” *American Sociological Review* 65(4): 529–546.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 138.
- Yuntoro, A. P., dan M. Subroto. 2022. “Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2): 8811–8821.
- Yusuf, I. 2013. “Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 10(2): 55–68.